

## PENDIDIKAN KAPABILITAS SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI NTT

Aristo Jadur \*<sup>1</sup>  
Saverinus Dosom<sup>2</sup>  
Gedofridus Ambut<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Filsafat, Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

\*email: [aristojadur514@gmail.com](mailto:aristojadur514@gmail.com)<sup>1</sup>, [safridosom@gmail.com](mailto:safridosom@gmail.com)<sup>2</sup>, [gedoambut7@gmail.com](mailto:gedoambut7@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, melihat fenomena kemiskinan di NTT. Kedua, masalah yang mempengaruhi angka kemiskinan di NTT. Ketiga, urgensi pendekatan kapabilitas dalam dunia pendidikan sebagai upaya meminimalisir angka kemiskinan di NTT.*

*Dalam tulisan ini ditemukan bahwa salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di NTT adalah faktor pendidikan. Akses masyarakat NTT dalam bidang pendidikan masih sangat terbatas. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat NTT yang tidak bebas dalam mendapatkan pendidikan, karena berbagai faktor, baik secara ekonomi maupun secara budaya. Selain itu, Proses pendidikan yang dijalankan di sekolah juga sangat memberatkan peserta didik, sehingga mereka kurang leluasa untuk mengembangkan keterampilannya. Sebagai solusi alternatif untuk meminimalisir angka kemiskinan di NTT diperlukan pendidikan yang mapan bagi masyarakat NTT. Tulisan ini menghadirkan konsep kapabilitas Amartya Sen sebagai basis filosofis untuk dapat meredam ketimpangan pendidikan di NTT. Konsep kapabilitas yang dicanangkan oleh Amartya Sen ini adalah mengedepankan aspek kebebasan. Menurut Sen kemiskinan terjadi bukan karena tidak adanya sumber daya alam, melainkan karena tidak ada aspek kebebasan bagi setiap individu dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Olehnya itu, pendidikan yang baik itu harus berlandaskan kebebasan. Setiap Individu berhak untuk mendapat pendidikan yang layak tanpa ada halangan dari pihak manapun. Dengan terciptanya pendidikan yang baik dan merata, maka kemiskinan di NTT setidaknya dapat dikurangi.*

**Kata kunci: kemiskinan, pendidikan, Amartya Sen, kapabilitas.**

### Abstract

*This research aims to; first, look at the phenomenon of poverty in NTT. Second, the problems that affect the poverty rate in NTT. Third, the urgency of the capability approach in education as an effort to minimize poverty in NTT. In this paper, it is found that one of the causes of increasing poverty in NTT is the education factor. The access of the people of NTT to education is still very limited. In this case, there are still many people in NTT who are not free to get an education, due to various factors, both economically and culturally. In addition, the education process carried out at school is also very burdensome for students, so they are less free to develop their skills. As an alternative solution to minimize poverty in NTT, a well-established education is needed for the people of NTT. This paper presents Amartya Sen's concept of capability as a philosophical basis to be able to reduce educational inequality in NTT. The concept of capability launched by Amartya Sen is to prioritize the aspect of freedom. According to Sen, poverty occurs not because of the absence of natural resources, but because there is no aspect of freedom for each individual in various aspects, including education. Therefore, good education must be based on freedom. Every individual has the right to get a proper education without any hindrance from any party. With the creation of good and equitable education, poverty in NTT can at least be reduced.*

**Keywords: Poverty, education, Amartya Sen, capability.**

### PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. Hampir setiap negara di belahan dunia mengalami kemiskinan, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia masalah kemiskinan menjadi isu yang sangat krusial. Berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk melawan kemiskinan di Indonesia sudah

diterapkan. Namun, Indonesia tetap menjadi salah satu Negara dengan tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari 38 provinsi dan ribuan pulau. Salah satu provinsi yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang dikategorikan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat di NTT sangat lemah. Pada umumnya, kemiskinan menggambarkan rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia sendiri pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menentukan kriteria kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar ini, ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. *Pertama, headcount index*. Indikator ini digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan BPS sebagai dasar perhitungan *headcount index* ditentukan berdasarkan batas pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan setara dengan 2.100 kalori per hari dan konsumsi makanan. *Kedua*, indeks kedalaman kemiskinan. *Ketiga*, indeks keparahan kemiskinan (Manek, Bahrudin, 2016: 87).

Jenis-jenis kemiskinan yang terjadi di NTT pun bervariasi, baik kemiskinan secara struktural maupun kemiskinan kultural. Penyebabnya pun sangat kompleks. Salah satu hal yang menurut penulis paling esensial mengapa kemiskinan di NTT sangat tinggi dan sukar untuk dihilangkan adalah tingkat pendidikannya masih sangat lemah. Akses untuk mendapatkan pendidikan masyarakat NTT itu sangat minim. Masih banyak anak-anak NTT tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan kurikulum yang digunakan juga sangat memberatkan setiap peserta didik. Selain itu, salah satu hambatan dalam pendidikan di NTT adalah kebudayaan patriarki. Dalam kebudayaan patriarki, seperti di Manggarai misalnya, akses untuk mendapatkan pendidikan hanya diprioritaskan kepada kaum laki-laki. Hal ini tentunya merampas hak dan kebebasan kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Berangkat dari persoalan ini, tulisan ini hendak memberikan suatu solusi agar kemiskinan di NTT setidaknya bisa dikurangi. Pendidikan dalam pendekatan kapabilitas adalah salah satu solusi yang ingin ditawarkan. Pendidikan dalam hal ini adalah mementingkan kebebasan seseorang individu. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan yang mutlak tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk kebudayaan patriarki. Konsep kapabilitas ini adalah salah konsep yang dicanangkan oleh Amartya Sen, seorang ekonom sekaligus filsuf asal India yang memenangkan penghargaan nobel tahun 1998. Lokus utama pembicaraannya adalah kebebasan. Maka dari itu penulis mengadopsi pandangan ini sebagai basis filosofis tulisan ini untuk meredam angka kemiskinan di NTT. Secara keseluruhan tulisan ini dibagi dalam empat bagian. *Pertama*, akan dijelaskan secara singkat biografi dan konsep kapabilitas Amartya Sen. *Kedua*, akan diulas secara singkat kemiskinan di NTT. *Ketiga*, menjelaskan relevansi konsep kapabilitas Amartya Sen dalam pendidikan dan sebagai jawaban dalam mengentas kemiskinan di NTT. *Keempat*, akan ditutup dengan kesimpulan.

#### **METODE**

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis isi. penelitian kualitatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Warul Walidin, dkk sesungguhnya adalah melihat fenomena atau realitas yang sesungguhnya tanpa batasan pandangan (2015; 2). Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, internet dan juga berbagai media dan informasi yang berhubungan dengan tema ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Biografi Intelektual Amartya Sen**

Amartya Kumar Sen lahir pada 3 November 1933 di Santiniketan, Begal Barat. Sen berasal dari keluarga yang memiliki intelektual dan pendidikan yang cukup mengakar. Ayahnya, Ashutosh Sen, pengajar kimia di Universitas Dhaka, sementara kakeknya, Kshiti Mohan Sen, adalah pengajar

sastra Sankrit di Visva-Bharati, sebuah sekolah yang didirikan oleh peraih nobel sastra 1913, Rabindranath Tagore. Amartya Sen merupakan salah seorang yang mendapat penghargaan nobel dari India. Sen lahir dengan latar belakang India, di mana negara ini banyak terjadi kasus-kasus kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim. Sen pertama-tama belajar di India, sekolah dari Universitas Visva-Bharati, Kolose Presidency, Kalkuta dan sekolah ekonomi Delhi, kemudian ia melanjutkan studi ke Kolose Trinity, Cambridge. Di Kolose ini ia mendapatkan gelar BA pada tahun 1956 dan Ph. D., pada tahun 1959 (Nugroho, 2008: 20).

Salah satu sentrum pemikiran Sen adalah di bidang ekonomi. Kontribusi revolusioner Sen terhadap indikator ekonomi dan sosial pembangunan adalah konsep "kapabilitas". Pada tahun 1999, Sen kembali pendekatan kapabilitas dalam bukunya *Development as Freedom*. Sen berpendapat bahwa pembangunan harus dilihat sebagai upaya untuk memajukan kebebasan nyata yang dapat dinikmati individu, dibandingkan hanya berfokus pada metrik seperti PDB atau pendapatan per kapita.

Sen pernah mengajar pada bidang ilmu ekonomi di Universitas Calcutta, Universitas Jadavpur, Delhi, Oxford, sekolah ekonomi London, Harvard, dan menjadi master dari Kolose Trinity, Cambridge, pada tahun 1997-2004. Pada Januari tahun 2004 ia kembali ke Harvard dan mengajar hingga sekarang. Dia telah mempublikasikan banyak karya, baik buku maupun jurnal dengan isu seputar kelaparan, teori perkembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, mekanisme dasar dari kemiskinan, dan liberalisme politik. Berbagai penghargaan telah diterimanya dari berbagai universitas di dunia. Salah satu penghargaan yang paling penting juga adalah penghargaan nobel pada bidang ilmu ekonomi atas karyanya tentang ekonomi kesejahteraan pada tahun 1998 (<https://id.wikipedia>).

### **Konsep Kapabilitas Amartya Sen**

Konsep kapabilitas yang dicanangkan oleh Amartya Sen berhubungan erat dengan kebebasan seseorang. Kebebasan tidak hanya dipahami sebagai tidak adanya paksaan, tetapi juga kemampuan untuk mencapai sesuatu. Sebagai konsep, pengertian kapabilitas tentu memperkaya makna kebebasan yang secara generik dipahami sebagai tidak adanya paksaan dari luar. Seseorang dalam memilih sesuatu yang dianggap bernilai bukan karena adanya paksaan dari luar, tetapi karena kebebasan yang dimiliki untuk mencapai sesuatu. Amartya Sen lebih menekankan bahwa kapabilitas sangat berperan langsung dalam menentukan martabat dan kualitas hidup seseorang. Pendekatan kapabilitas dianggap sebagai unsur yang fundamental dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang bebas. Hal ini bertitik tolak dari pengandaian bahwa manusia memiliki kemungkinan untuk menentukan sesuatu yang bernilai bagi dirinya. Dalam pandangan Sen, kebebasan memiliki nilai intrinsik, dimana pembangunan diselenggarakan untuk memperluas kebebasan. Kebebasan tak bisa direduksi menjadi alat untuk mengabdikan pada kesejahteraan material. Walaupun demikian, kebebasan memiliki nilai instrumental dalam arti bahwa kebebasan memungkinkan manusia melakukan sesuatu (Daven: 2020: 73).

Konsep kapabilitas yang dicanangkan oleh Amartya Sen juga meliputi dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek kesempatan. Dua hal inilah yang menjadi titik sentral pemikiran Sen tentang kebebasan. Dalam aspek proses, kebebasan dimaknai sebagai kebebasan yang absolut dalam memilih atau menjalankan sesuatu yang dianggap baik bagi diri kita tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sedangkan kebebasan dalam arti kesempatan, ia menekankan pengertian substantif, yakni adanya kemampuan untuk mencapai sesuatu yang bernilai (Daven: 2020: 4).

Konsep kapabilitas Amartya Sen juga berhubungan kemiskinan. Dengan pendekatan kapabilitas, orang miskin tidak lagi dipahami sebagai orang yang berpendapatan rendah. Namun, Sen memahami orang miskin sebagai orang yang kehilangan kapabilitas. Seseorang yang mengalami kehilangan kapabilitas juga dikatakan miskin. Dengan ini Sen ingin mengatakan tolok ukur kualitas hidup seseorang bukan dilihat dari pendapatannya, tetapi dilihat sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini pendapatan tidak menjadi tolok ukur untuk menentukan kesejahteraan seseorang, tetapi seberapa besar kapabilitas yang dimiliki seseorang (Daven: 2020: 70).

### **Kemiskinan Sebagai Hilangnya Kapabilitas**

Pengukuran kemiskinan pada umumnya dilihat dari pendapatan perkapita, pemenuhan kebutuhan pokok, dan tingkat kesejahteraan hidup manusia. Penyebab kemiskinan juga sangat kompleks, seperti disebabkan oleh bencana alam, kebudayaan, dan pendapatan yang rendah. Dalam kacamata Sen, penyebab kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya pendapatan seseorang, tetapi Sen lebih melihat kemiskinan disebabkan oleh hilangnya kapabilitas. Kehilangan kapabilitas mengakibatkan setiap individu tidak mampu (*inability*) mendapat kebutuhan dasar, seperti tidak mampu memperoleh makan dengan gizi yang cukup, memiliki rumah, termasuk tidak mampu mendapat pendidikan. Identifikasi kehilangan kapabilitas itu, tidak hanya dari rendahnya pendapatan, tetapi juga kondisi tubuh seseorang (cacat atau tidak cacat), kondisi alam, dan juga kondisi sosial. Menurut Sen, kemiskinan terjadi bukan hanya rendahnya pendapatan, tetapi karena banyak faktor (Daven:2020: 129-130). Pendapatan menurutnya tidak menjadi tolak ukur, melainkan hanya sebuah sarana.

Dalam pendekatan kapabilitas ini, Sen mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena tidak adanya ruang dan kebebasan bagi setiap masyarakat dalam menentukan pilihan hidupnya. Kemiskinan terjadi akibat dari perampasan kapabilitas. Sen menemukan bahwa kemiskinan yang menjerat beberapa negara Asia dan Afrika adalah buah kelalaian negara menafikan demokrasi dalam mengelola perekonomian. Dalam melihat realitas di negara-negara Asia-Afrika, masih banyak yang mempraktekan demokrasi sebatas demokrasi formal yang tercermin dalam pemilihan umum. Demokrasi substansial yang menghendaki kekuasaan dan kedaulatan rakyat dalam pelbagai kehidupan belum berjalan secara optimal. Ia meyakini bahwa jika manusia mengoptimalkan potensinya, maka maksimal pula kontribusi untuk kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, Sen ingin menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara demokrasi terjadi bukan diakibatkan oleh bencana alam, namun akibat absennya sebuah demokrasi.

Sama halnya dengan konteks NTT yang saat ini mengalami masalah kemiskinan yang tak kunjung selesai. Hemat penulis, masalah kemiskinan yang masih sangat tinggi disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah. Hal ini terjadi karena kebebasan setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak masih sangat minim. Konsep pendidikan yang diterapkan lebih membebankan peserta didik. Akibatnya setiap orang tidak merasa bebas dalam menentukan pilihannya dan mengaktualisasikan kemampuan dalam dirinya. Selain itu, masalah budaya patriarki juga menjadi salah satu masalah yang menghambat proses pendidikan di NTT. Budaya yang terus dihidupkan oleh masyarakat telah membuat sistem pendidikan tidak merata. Di Manggarai misalnya, akses pendidikan itu masih diprioritaskan untuk laki-laki, sedangkan pendidikan terhadap kaum perempuan seringkali diabaikan. Hal ini tentunya merampas hak dan kebebasan perempuan untuk mendapat pendidikan yang layak.

### **Masalah Kemiskinan di NTT**

Tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Berdasarkan data BPS, provinsi NTT menempati posisi ke-3 sebagai provinsi yang miskin. Pada bulan Maret 2024 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 1,13 juta orang (BPS,2024). Angka ini tentunya bukanlah masalah yang sepele. Tingginya angka kemiskinan ini tentunya menjadi catatan besar bagi pemerintah Indonesia.

Jika dilihat dari segi geografisnya, NTT sebenarnya memiliki kekayaan alam yang sangat kaya dan beragam. Namun, ironisnya hingga saat ini masyarakat NTT masih hidup menderita dalam bayang-bayang kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa provinsi NTT masih disebut sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, yakni masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, pendapatan setiap hari masih sangat rendah, angka putus sekolah semakin tinggi dan banyaknya masyarakat memilih untuk pergi merantau keluar daerah. Tercatat ada ribuan masyarakat NTT yang pergi mengadu nasib di tanah perantauan dan menjadi imigran ilegal di Malaysia dan di beberapa negara lainya. Dari keuskupan Larantuka tercatat sebanyak 27.000 orang, keuskupan Maumere sebanyak 1.500 orang, dan keuskupan Agung Ende sebanyak 10, 000 orang (Onta, 2021: 5). Berdasarkan data ini dapat diafirmasi bahwa kemiskinan di NTT ini sangat mengakar dan sangat kompleks.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini pun nampak terjadi karena berbagai faktor pemicu. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan ini pun antara lain, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pendidikan. *Pertama*, faktor ekonomi. Ekonomi memang menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan seseorang. Tingkat pendapatan sangat menentukan kehidupan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat NTT pendapatan perkapita dihitung sangat relatif rendah. Sebagaimana yang dilaporkan oleh BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya sebesar Rp 20,58 juta per tahun pada 2021. Artinya, pendapatan penduduk NTT merupakan yang terendah dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya. Pendapatan penduduk NTT tersebut hanya sepertiga dari pendapatan penduduk Indonesia yang mencapai Rp 62,2 juta per tahun. PDRB per kapita NTT tersebut setara 7,5% dari pendapatan penduduk DKI Jakarta yang mencapai Rp 274,71 juta per tahun (Kusnandar, 2021).

*Kedua*, faktor politik. Dalam suatu negara demokratis, politik sudah menjadi hal yang paling esensial. Politik dipahami sebagai suatu nahkoda untuk memberi atau menciptakan suatu kesejahteraan. Dalam hal ini, politik sebagai suatu alat atau instrumen untuk mencapai suatu kesejahteraan. Orang yang berpolitik juga adalah orang yang dianggap memiliki kesejahteraan atau orang yang memiliki kapasitas untuk mengusahakan kesejahteraan (para pejabat pemerintahan atau para elit). Pada intinya, kesejahteraan sosial seluruh warga merupakan tujuan dari sistem politik di manapun di dunia. Politik merupakan proyek kesejahteraan dunia (Dancar, 2014: 41). Namun, kerap kali politik juga menjadi akar terjadinya kemiskinan. Persoalan kemiskinan ini sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, tidak semata-mata ekonomi. Kemiskinan lebih bersifat multidimensi dan saling terkait satu sama lain. Masyarakat yang miskin secara ekonomi erat kaitannya dengan faktor dan struktural politik (Susetiawan, 1996).

Lalu bagaimana dengan politik di NTT? Praktisnya, politik di NTT bisa dikatakan gagal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat NTT. Wajah pemerintah yang memimpin NTT dari masa-kemasa belum mampu membawa NTT keluar dari zona keterpurukan ini. Rupanya kemiskinan hanya dipandang sebagai isu belaka daripada masalah yang harus segera dipecahkan. Sehingga dalam situasi seperti ini, usaha untuk mencari kebijaksanaan tidak lagi menjadi hal yang paling penting. Terjadinya juga polarisasi politik, di mana para elit saling tumpang-tindih. Proyek pembangunan yang dijalankan juga tidak merata (Luter, Indrocahyo, Resti, 2019: 39). Selain itu, kebijakan publik yang tidak tepat sasaran. Pemerintah dalam menentukan arah kebijakannya tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat melainkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga tidak heran kalau korupsi sangat mengental di NTT. Tentunya perilaku politik dari para elit ini semakin memarjinalisasi masyarakat NTT dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini.

*Ketiga*, faktor pendidikan. Selain kedua faktor di atas, menurut penulis faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di NTT adalah faktor pendidikan. Masalah pendidikan inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Salah satu permasalahan pokok dari masyarakat NTT adalah lemahnya akses pendidikan. Masih banyak anak-anak NTT yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Padahal pada dasarnya, suatu peradaban akan mengalami kemajuan ketika setiap orang memiliki akses pendidikan yang baik dan bebas. Peta jalan Pendidikan yang kurang memadai juga membuat banyak anak-anak kurang mengembangkan kebebasan akan potensi dirinya. Dalam hal ini, proses pendidikan atau kurikulum yang ditanamkan di Indonesia kurang memperhatikan kebebasan dari setiap peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya.

Masalah ketertinggalan Pendidikan di NTT disebabkan karena adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial turut mempengaruhi akar permasalahan Pendidikan di NTT. Orang akan mendapatkan pendidikan tergantung pada faktor finansialnya. Dalam hal ini, orang yang mapan secara ekonomi akan mendapatkan akses pendidikan yang layak, sedangkan yang miskin hanya akan menjadi penonton, karena kebebasan mereka untuk mengakses pendidikan dihalang oleh faktor ekonomi. Sehingga tidak mengherankan jika pada akhirnya para peserta didik dari kelas menengah terpaksa meninggalkan sekolah untuk bekerja (Irawati dan Kurniawan, 2021: 20). Selain itu, masalah yang sangat krusial dalam menghambat pendidikan di NTT adalah masih

melekatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, Salah satu daerah di NTT yang masih menghidupkan budaya patriarki adalah di Manggarai. Masyarakat Manggarai pada umumnya masih berpegang teguh pada konsep perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini pun merambat hingga pada ranah pendidikan. Dalam hal ini terjadi pemisahan antara hak laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Orang yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak diprioritaskan. Salah satu argumen mengapa kaum laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena kaum laki-laki dianggap menjadi penerus keluarga. Kaum laki-laki diberi label sebagai *ata one* (orang dalam) yang nantinya bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan, sedangkan kaum perempuan diberi label sebagai *ata peang* (orang luar) yang nantinya meninggalkan keluarga dan memulai kehidupan yang baru di keluarga lelaki yang menikahinya. Pemberian label sebagai *ata peang* ini turut mempengaruhi pendidikan terhadap kaum perempuan. Banyak masyarakat menganggap bahwa jika kaum perempuan mendapatkan pendidikan yang layak hanya akan menguntungkan suaminya nanti.

Dengan demikian, konsep budaya patriarki seperti ini sebenarnya secara langsung telah merampas hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada nilai kebebasan dalam diri perempuan, karena ia disekat oleh aturan-aturan budayanya. Dalam Hal ini, nilai kemanusiannya sebagai makhluk yang bebas seolah-olah di rampas oleh kebudayaannya. Padahal kebebasan seperti yang diungkapkan oleh Amartya Sen adalah suatu yang bernilai pada dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar (Sunaryo,2017: 4).

## **Relevansi Pendekatan Kapabilitas Dalam Pendidikan sebagai Upaya Untuk Meredam Kemiskinan di NTT**

### **Kapabilitas dan Relevansinya Bagi Pendidikan**

Seperti yang diamanatkan oleh Sen, seseorang dapat mencapai kesejahteraan sejauh ia memiliki kebebasan. Kebebasan di sini meliputi berbagai faktor termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu faktor krusial yang menghambat pendidikan di NTT adalah tidak adanya kapabilitas bagi setiap orang untuk dapat mengakses pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan dari setiap individu, tanpa ada intervensi dari luar termasuk kebudayaan.

Pendidikan hendaknya menjadi tempat setiap bagi setiap orang untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan yang berbasis kebebasan akan menciptakan manusia yang kreatif. Bebas dalam pendidikan, mengandaikan bebas untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi diri seseorang. Bebas dalam arti mandiri dalam berpikir tanpa ada paksaan. Selain itu, pendidikan kapabilitas akan meningkatkan kesejahteraan seseorang dalam menentukan masa depannya. Pendidikan yang bebas ini berarti seluruh aturan yang mengekang atau yang merampas kebebasan orang harus direkonstruksi kembali. Kebebasan mesti dipahami sebagai perlawanan terhadap penindasan, dan ketidakadilan yang membuat harkat dan martabat orang tidak dihargai karena tidak ada ruang untuk mengakses potensi yang ada dalam dirinya (Topatimasang, Raharjo, Fakhri, 2005: 9).

Dalam hal ini, kebudayaan patriarki juga harus ditiadakan karena ini melanggar prinsip kebebasan bagi kaum perempuan untuk dapat mengakses pendidikan secara layak. Dengan mengedepankan kebebasan ini, pendidikan tentunya akan menjadi tempat bagi setiap orang NTT dapat mengembangkan potensi dirinya.

### **Pendidikan Sebagai Upaya Meredam Kemiskinan di NTT**

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang terjadi apabila sebuah pemerintah salah mengelola suatu daerah. Masalah kemiskinan yang terjadi di NTT disebabkan oleh pelbagai macam faktor seperti yang telah dijelaskan di atas. Masalah kemiskinan di NTT sering kali dikaitkan dengan kurangnya ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Masalah kemiskinan di NTT berhubungan dengan rendahnya pendapatan perkapita.

Namun, bertolak dari pemikiran Sen, pendapatan bukanlah tolak ukur untuk menentukan kesejahteraan seseorang, melainkan kebebasan. Seseorang dikatakan sejahtera sejauh ia merasa bebas. Oleh karena itu, menurut Sen kemiskinan dapat ditanggulangi apabila hak-hak dasar dari kaum miskin ditegakan.

Kemiskinan di Indonesia umumnya dan di NTT khususnya jika dikaitkan dengan pemikiran Sen, disebabkan karena pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pendidikan adalah hak seharusnya dimiliki oleh masyarakat agar dapat menunjang kehidupan yang lebih baik (Syawaluddin, 2015: 5). Bertolak dari ini, penulis menganggap masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTT disebabkan karena kurangnya aspek kebebasan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini masih banyak orang yang tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginannya. Konsep pendidikan yang diterapkan di NTT masih bersifat konservatif dan tidak memperhatikan kebebasan setiap individu.

Selain itu, budaya patriarki yang selalu membatasi kebebasan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini membuat wanita NTT selalu dilabeli dengan wanita yang indeks pendidikannya sangat rendah. Olehnya itu, melalui konsep kapabilitas yang dicanangkan oleh Amartya Sen hendak membongkar semua konsep lama yang tidak mengedepankan kebebasan. Kebebasan dianggap sebagai jalan menuju kesejahteraan. Ketika kebebasan dalam dunia pendidikan dirasakan oleh masyarakat NTT, maka ini akan membawa angin segar bagi kemajuan provinsi NTT yang saat ini sedang dilanda kemiskinan. Kemiskinan hanya bisa dilawan, ketika masyarakatnya memiliki kemampuan intelektual untuk dapat mengembangkan kapasitas dan keterampilannya dalam bidang yang diminatinya tanpa ada intervensi dari pihak luar. Selain itu, urgensi pendidikan sangat relevan untuk konteks NTT di mana kapasitas SDM-nya masih sangat rendah, sehingga tidak bisa bersaing di tengah era globalisasi (Aldjufri, 2004, 158). Dengan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya, keterampilannya, dan dapat bersaing dalam dunia kerja.

#### KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, masalah kemiskinan di NTT menjadi fenomena yang sangat krusial dan sangat memprihatinkan. Masalah kemiskinan ini bukanlah masalah yang baru terjadi, melainkan sejak provinsi NTT terbentuk. Dengan ini dapat dikatakan, bahwa masalah kemiskinan ini sudah mengakar. *Kedua*, penyebab terjadinya kemiskinan di NTT bervariasi, salah satunya adalah faktor pendidikan. Kurangnya faktor pendidikan membuat masyarakat NTT tidak bisa bersaing dalam dunia pekerjaan, karena kemampuan intelektual yang terbatas. Selain itu, masyarakat NTT kurang terampil dalam menciptakan suatu kreasi yang baru, karena secara intelektual mereka kalah saing. Maraknya masalah pendidikan di NTT dipengaruhi juga karena tidak adanya sistem kapabilitas atau kebebasan yang diberikan kepada setiap orang. Dalam hal ini kebebasan orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak ada. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang selalu mengikat dan tidak memperhatikan aspek kebebasan bagi setiap peserta didik. Selain itu, budaya patriarki yang semakin mendominasi, sehingga banyak kaum perempuan yang tidak bisa mengakses pendidikan yang layak. *Ketiga*, sebagai solusi alternatif atas permasalahan ini, maka Sen menganjurkan suatu prinsip kebebasan. Masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTT, tidak bisa dilihat dan diukur sebagai rendahnya pendapatan masyarakat. Masalah yang dialami oleh masyarakat NTT sangat kompleks, salah satunya adalah kemiskinan. Jika dilihat dari kaca mata pemikiran Sen, salah satu faktor mengapa pendidikan di NTT itu tidak berkembang adalah karena tidak adanya ruang kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itu, Sen menganjurkan suatu konsep kapabilitas atau ruang kebebasan bagi setiap orang untuk dapat mengembangkan potensi dalam dirinya dalam dunia pendidikan, tanpa ada halangan dan intervensi dari pihak manapun juga. Dengan mengedepankan prinsip kebebasan, maka masa depan pendidikan di NTT akan semakin cerah dan menghasilkan pendidik yang berkualitas dan berketerampilan. Sehingga, bukan tidak mungkin masalah kemiskinan di NTT dapat teratasi ketika sumber daya manusianya (SDM) semakin meningkat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aldjufri, Jusbakir. (2004). *Kepemimpinan Negarawan: Otonomi Daerah Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kompetensi Lokal*. Jakarta: The HQ Center.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 19,48 persen". <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1381/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-19-48-persen.html>.
- Dancar, Aleksander. (2014). "Politik Dan Proyek Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7: (1), 41.
- Nugroho, Dwi Susatyo Adi. (2008). "Pendekatan Kapabilitas, Telaah Perbandingan Atas Keadilan Tradisional dalam Pandangan Rawlsian dan Dworkinian". *Skripsi Sarjana*, Universitas Indonesia: Jakarta, 20.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Amartya\\_Sen](https://id.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen), diakses pada 2 Mei 2023.
- Kusnandar, Viva Budy. (2021). "PDRB Per Kapita Nusa Tenggara Timur Terendah se-Indonesia pada 2021". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/pdrb-per-kapita-nusa-tenggara-timur-terendah-se-indonesia-pada-2021>. Diakses 21 April 2025.
- Luther, Martin, Irlan Indrocahyo, dan Islahwani Loka Vita Resti. (2019). "Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17 (2), 39.
- Manek, Marianus, Rudy Bahrudin. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Pertimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Telaah Bisnis*, 17(2), 87.
- Matias, Daven. (2020). "Kebebasan Sebagai Pembangunan Amartya Sen". *Bahan Mata Kuliah Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero*, 73.
- Onta, Alfridus. (2021). "Kontribusi Pendidikan Keterampilan Dalam Upaya Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Skripsi Sarjana*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 5.
- Ratna Irawati, Indera dan kevin Nobel Kurniawan. (2021). "Kesenjangan Pendidikan Harus Dibenahi", dalam Lucia Ratih Kusumadewi, ed, *Pendidikan Untuk Apa dan Untuk Siapa? Kajian Kritis Tentang Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020- 2035*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.
- S, Syawaluddin. "(2015). Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan Dan Kemiskinan". *Jurnal Al- Buhuts*, 11 (1), 5.
- Sunaryo. (2017). *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*. Jakarta: Gramedia.
- Susetiawan. (1996). "Politik kemiskinan, sebuah makna dalam kehidupan sosial", paper dipresentasikan pada Seminar Sehari Rekonstruksi Garis Kemiskinan dari Berbagai Tinjauan, di Fakultas Geografi UGM Yogyakarta
- Topatimasang, Roem Toto Raharjo, Mansour Fakhir ed. (2005). *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: INSISTPress.